

TESIS

**IMPLEMENTASI INOVASI PROGRAM LORONG WISATA
DI KOTA MAKASSAR**

***(IMPLEMENTATION OF THE INNOVATION TOURISM ALLEY
PROGRAM IN THE CITY OF MAKASSAR)***

SHINTA DANCE INDRAWATI

E012212003



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2024

TESIS

**IMPLEMENTASI INOVASI PROGRAM LORONG WISATA
DI KOTA MAKASSAR**

***(IMPLEMENTATION OF THE INNOVATION TOURISM ALLEY
PROGRAM IN THE CITY OF MAKASSAR)***

SHINTA DANCE INDRAWATI

E012212003



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

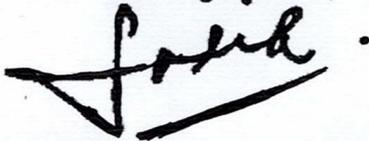
**IMPLEMENTASI INOVASI PROGRAM LORONG WISATA
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh
SHINTA DANCE INDRAWATI
E012212003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **11 Januari 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

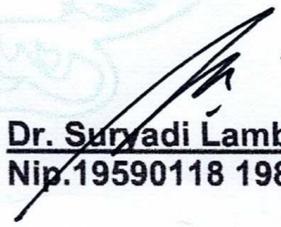
Menyetujui

Pembimbing Utama,



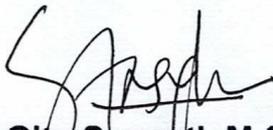
Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM.
Nip. 19600915 198707 1 001

Pembimbing Pendamping,



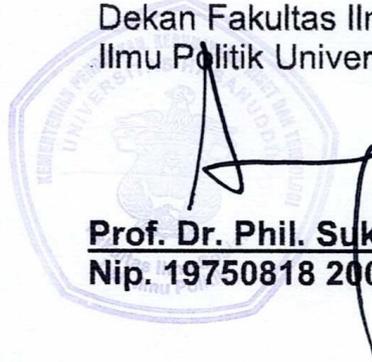
Dr. Suryadi Lambali, MA.
Nip. 19590118 198503 1 006

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. Gita Susanti, M.Si.
Nip. 19650311 199103 2 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si.
Nip. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shinta Dance Indrawati
NIM : E012212003
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul, ***Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata Di Kota Makassar***

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alih tulisan orang lain, bahwa Tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Januari 2024

Yang menyatakan,



Shinta Dance Indrawati

KATA PENGANTAR

Shallom.....

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat, anugerah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata Di Kota Makassar” sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan tesis pada program studi magister Administrasi Publik.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan arahan serta dukungan berharga dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Kedua orang tua penulis yakni ayahanda Daniel Mulyono dan Ibunda Lince yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya, terimakasih atas didikan, kasih sayang, semangat yang selalu diberikan sehingga bapak dan mama menjadi satu-satunya alasan utama tesis ini bisa terselesaikan. Serta Kakak penulis yakni Julia Dance Setyowati, S.Tr.Kes., M.Tr.TGM atas dukungan, doa dan semangat yang telah diberikan dalam pembuatan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.

3. Bapak Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Suparman, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi, Ibu Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan bapak Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber daya dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
4. Ibu Dr. Gita Susanti, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Nur Sadik, MPM selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan nasehat dari proposal hingga tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak Dr. Suryadi Lambali selaku pembimbing 2 yang telah senantiasa memberikan bimbingan dan memberikan nasehat, serta waktu dalam pembimbingan dari awal proposal hingga tesis dapat terselesaikan.
7. Para Tim Penguji Bapak Prof. Dr. H. Muh. Thahir Haning, M. Si, Bapak Dr. H. Muhammad Yunus, M.Si, serta Ibu Dr. H.

Syahribulan, M.Si yang telah memberikan saran dan masukan guna menyempurnakan tesis ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik yang telah membagi ilmunya dan membimbing penulis selama mengikuti proses perkuliahan pada jenjang Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
9. Bapak Dr. Didik Iskandar, M.Si yang telah memberikan saran, masukan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah membantu pengurusan berkas selama kuliah, seminar proposal, ujian hasil hingga ujian tutup.
11. Seluruh informan dalam penelitian ini, yang sudah memberikan data, informasi dan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian dan tesis ini.
12. Seluruh rumpun keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.
13. Saudara-saudari seperjuangan Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin Angkatan 2022 semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kesuksesan di jalan masing-masing.
14. Teman-teman “Jodoh sepertiga Malam” Rizky Yulia Ilmi, S.IP., M.A.P, Anisa Fitri, S.A.P., M.A.P, Andi Novita Samsir, S.A.P, Irna

Nuryani, S.A.P terimakasih untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan. Juga kepada saudara Hardi Setiawan, S.A.P., M.A.P yang juga senantiasa memberikan dukungan dan semangat.

15. Kepada Saudari Engka Reski Amalia, S.Sos, Saudari Nadia, S.E, Saudari Rista Nurdiana, S.Sos dan Saudari Sarmila, S.Sos terimakasih senantiasa mau mendengarkan segala bentuk keluhan kesah dan senantiasa memberikan motivasi, dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

16. Kepada Bapak dan Ibu Pendeta, teman dan kakak Guru sekolah minggu yang senantiasa mendukung di dalam doa untuk penulis. Rekan-rekan PKM Gereja KIBAID Jemaat Sudiang yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa.

Penulis menyadari dalam proses penyelesaiannya, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran gagasan, serta ide kritis demi perbaikan tesis ini lebih baik. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Makassar, 16 Oktober 2023

Penulis

Shinta Dance Indrawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Teori dan Konsep	12
1. Administrasi Publik	12
2. Kebijakan Publik	17
3. Implementasi	27
4. Inovasi.....	39
5. Implementasi Inovasi.....	51
6. Lorong Wisata	56
B. Penelitian Terdahulu	59
C. Kerangka Pikir.....	63
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis dan Tipe Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	64
C. Instrumen Penelitian	65
D. Fokus Penelitian.....	66
E. Sumber Data Penelitian	67
1) Data Primer	68

2) Data Sekunder	68
F. Informan Penelitian	68
G. Teknik Pengumpulan Data	70
1) Observasi	70
2) Wawancara	70
3) Dokumentasi	71
H. Teknik Keabsahan Data	71
1) Keterpercayaan (<i>Credibility</i>)	72
2) Keteralihan (<i>Transferability</i>).....	74
3) Kebergantungan (<i>Dependability</i>)	75
4) Kepastian (<i>Confirmability</i>).....	75
I. Teknik Analisis Data.....	75
1) Pengumpulan Data.....	76
2) Reduksi Data.....	76
3) Penyajian Data	76
4) Penarikan Simpulan dan Verifikasi	77
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	78
A. Karakteristik Objek Penelitian.....	78
B. Dinas Pariwisata Kota Makassar	80
1) Visi dan Misi Dinas Pariwisata	81
2) Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata.....	82
3) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata.....	83
C. Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar	84
1) Visi dan Misi	84
2) Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar	85
3) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar	86
D. Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	86
1) Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar..	87
2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	88
E. Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro Kota Makassar	88
1) Visi dan Misi	89
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	91
A. Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata Di Kota Makassar.....	91

B.	Faktor Individu.....	95
1)	Motivasi	96
2)	Norma atau Harmoni	113
3)	Kesesuaian atau Keselarasan	127
C.	Faktor Struktur	131
1)	Aturan dan Komunikasi.....	131
2)	Insentif.....	142
3)	Keterbukaan	151
4)	Resistensi atau Penolakan	156
D.	Faktor Budaya.....	160
1)	Guncangan atau Kejutan	160
2)	Pengelompokan.....	164
3)	Legitimasi	166
E.	Data Lorong Wisata dan Potensi Lorong Wisata	168
	BAB VI PENUTUP.....	171
A.	Kesimpulan	171
B.	Saran	173
	DAFTAR PUSTAKA.....	176
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	180

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kebijakan Publik.....	23
Gambar 2.2 Siklus Hambatan Inovasi.....	45
Gambar 2.3 Hubungan Faktor Individu, Struktural, dan Budaya Yang Mempengaruhi Implementasi Inovasi.....	53
Gambar 2.4 Kerangka Pikir.....	63
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Makassar	83
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar	86
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	88

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Data Lorong Wisata Tahun 2022	92
Tabel 5. 2 Jumlah Lorong Wisata di 5 Kecamatan Tahun 2022	94
Tabel 5. 3 Surat Keputusan Dsewan Lorong	120
Tabel 5. 4 Bantuan Pengembangan Lorong Wisata Tahun 2022	144
Tabel 5. 5 Bantuan Pengembangan UMKM Lorong Wisata Dinas Koperasi dan UKM	147
Tabel 5. 6 Matriks Potensi Lorong Wisata	169

ABSTRAK

SHINTA DANCE INDRAWATI. *Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar* (dibimbing oleh H. Muhammad Nur Sadik dan Suryadi Lambali).

Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar berdasarkan tiga faktor utama implementasi inovasi yang dikemukakan oleh Steelman (2010) yakni faktor individu, faktor struktur, dan faktor budaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan suatu fenomena dan mendeskripsikan data dan fakta terkait masalah dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar dengan menggunakan tiga faktor yang dikemukakan oleh Steelman (2010) yakni 1) faktor individu yang meliputi motivasi, norma, dan kesesuaian, 2) faktor struktur yang meliputi aturan dan komunikasi, insentif, keterbukaan, dan resistensi atau penolakan, 3) faktor budaya yang meliputi guncangan atau kejutan, pengelompokan, dan legitimasi. Berdasarkan pada faktor-faktor ini, implementasi inovasi program lorong wisata sudah cukup berhasil, namun masih memiliki kekurangan. Hal ini disebabkan pada faktor individu terdapat subfaktor kesesuaian yang menunjukkan belum adanya kesesuaian masyarakat dalam mengembangkan lorong wisata. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat. Pada faktor struktur terdapat subfaktor insentif yang menunjukkan belum memenuhi harapan masyarakat.

Kata kunci : implementasi, inovasi, lorong wisata



ABSTRACT

SHINTA DANCE INDRAWATI. *The Implementation of Tourism Alley Program Innovation in Makassar City* (supervised by H. Muhammad Nur Sadik and Suryadi Lambali)

This research aims to analyze the implementation of the Tourism Aisle Program Innovation in Makassar City based on the three main factors of innovation implementation proposed by Steelman (2010), namely individual factors, structural factors, and cultural factors. The type of research used is descriptive qualitative, namely to explain a phenomenon and describe data and facts related to the problem in the research. Data collection techniques are in-depth interviews, documentation observation. The results of the research show that the implementation of Tourism Alley Program Innovation in Makassar City uses three factors proposed by Steelman (2010), namely (1) individual factors which include motivation, norms, and conformity; (2) structural factors which include rules and communication, incentives, openness, resistance, or rejection, and (3) cultural factors which include shock, grouping, and legitimacy. Based on these factors, it is quite successful in implementing the tourist tunnel program innovation, but it still has shortcomings. This is because in individual factors there are sub-factors of suitability which indicate that there is no suitability of society in developing tourist alleys. This needs to be a concern for the government in increasing socialization for the community. For the structural factors, there are incentive sub-factors which show that they have not met community expectations.

Keywords: implementation, innovation, Tourism Alley



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya ialah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan suatu program pada dasar menjadi salah satu upaya dalam memberdayakan masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu, dinamika perkembangan pembangunan kota-kota di Indonesia saat ini sepertinya lebih melihat pada kuantitasnya. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan tanpa mempertimbangkan kualitas dan dampak bagi masyarakat serta pengelolaan lingkungan yang terkadang terabaikan.

Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, melalui pemberdayaan dan pengembangan masyarakat menjadi hal yang serius yang kemudian di wujudkan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat dengan berbagai bentuk program. Dalam hal ini pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yaitu melalui pembangunan pada sektor pariwisata atau wisata, dalam hal ini salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik tingkat lokal maupun nasional. Apabila hal ini mendapat perhatian dan dukung dari pemerintah, maka potensi terhadap daya tarik wisatawan untuk berkunjung akan meningkat

ke daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang menarik. Hal ini juga dapat mendukung peningkatan dan pengembangan masyarakat di daerah tersebut.

Dalam UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 30 berbunyi bahwa Pemerintah Daerah/kota diberikan wewenang dalam menyusun dan menetapkan induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota atau menetapkan destinasi baru. Hal ini tentu berkenaan dengan pemerintah daerah dalam mengelola serta mengembang wisata yang berada di wilayahnya. Hal ini bahwa pemerintah daerah dapat menyusun program-program yang dikembangkan di daerah tersebut, tentunya dibuat dengan sedemikian rupa menarik serta kreatifitas yang diperlukan. Tentunya dalam mengimplementasikan program tersebut diperlukan bantuan dan dukungan dari masyarakat daerah tersebut. Dalam mengimplementasikan program yang telah ditetapkan tentunya juga diperlukan inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan serta dapat dijadikan percontohan bagi daerah-daerah lain.

Dengan adanya inovasi dalam pelaksanaan suatu program dapat berpengaruh terhadap perhatian publik mengenai program yang dijalankan dan dapat diadopsi menjadi suatu program yang bermanfaat. Laurence O'Toole dalam (Steelman, 2010) mendefinisikan inovasi kebijakan ialah suatu pola kegiatan untuk mencapai tujuan baru atau meningkatkan target tujuan yang sudah siap. Inovasi dari sudut pandang

individu, yakni Inovasi merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu yang mengadopsinya, dan mewakili penyimpangan yang signifikan dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang ada di Indonesia sangat diharapkan bahwa dalam pembuatan dan pelaksanaan program memiliki inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan terlebih dalam pengembangan di daerah tersebut.

Sebagai sebuah pilihan rasional, inovasi seakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi tuntutan organisasi publik baik di Pemerintah Pusat maupun daerah. Hal tersebut seiring dengan berbagai perubahan dan dinamika tuntutan masyarakat. Pertimbangan yang lebih serius harus diberikan pada tuntutan inovasi dalam organisasi publik serta di pemerintah pusat maupun daerah. Ini adalah hasil dari inovasi terintegrasi, yang secara bersamaan mempengaruhi semua divisi organisasi dengan kekuatan yang menyebar. Inovasi yang diterapkan sebagian hanya akan berdampak pada beberapa area organisasi dan akan berdampak lebih kecil secara keseluruhan pada visi dan tujuan organisasi.

Di Indonesia penerapan regulasi tentang inovasi terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab XXI tentang Inovasi Daerah dijelaskan bahwa inovasi daerah diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat

berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.

Dalam pembuatan program yang memiliki inovasi tentu diperlukan pengimplementasian dalam menjalankan program tersebut. Sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Implementasi ialah rangkuman dari beberapa kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Implementasi memiliki peranan penting dalam pengembangan inovasi program, terlebih pada daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Secara teori, implementasi suatu kebijakan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuannya, tidak ada yang lebih atau kurang sesuai. Ada dua pilihan dalam menjalankan kebijakan publik yaitu mengeksekusinya secara langsung dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan. Implementasi dapat dianggap sebagai interaksi antara serangkaian tujuan dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Akibatnya, implementasi berubah menjadi jaringan yang tidak terlihat tetapi memiliki potensi untuk mengembangkan lebih banyak hubungan antara sebab dan akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Mengubah keputusan menjadi suatu kegiatan atau menjalankan organisasi dengan cara tertentu merupakan aspek

penting dari implementasi kebijakan. Dan dengan cara ini, segala sesuatu yang dilakukan masuk akal dan bekerja secara efektif dalam lingkup lembaganya.

Dalam mengimplementasikan suatu program inovasi, menunjukkan bahwa ada kondisi ideal yang mendorong inovasi dari waktu ke waktu yakni (a) individu yang termotivasi dan bekerja dalam norma sosial tempat kerja dan agensi dominan atau budaya organisasi yang mendukung inovasi atau praktik inovatif; (b) struktur yang memfasilitasi aturan dan komunikasi yang jelas, insentif yang mendorong kepatuhan dalam praktik inovatif, lingkungan politik yang terbuka untuk inovasi, dan kesadaran akan perlawanan dan langkah-langkah untuk mengatasi, mengurangi, atau menetralkan oposisi; dan (c) strategi untuk membingkai masalah untuk mendukung praktik inovatif, memanfaatkan guncangan atau memfokuskan peristiwa jika terjadi, dan menggunakan inovasi untuk meningkatkan legitimasi.

Dalam mengimplementasikan suatu inovasi program tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat mendorong terlaksananya suatu program. Aset utama dalam pencapaian inovasi kebijakan program adalah sumber daya manusianya. Kemampuan organisasi untuk mencapai visi dan tujuannya akan meningkat dengan bantuan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini disebabkan fakta bahwa organisasi dipimpin oleh orang-orang yang mampu dan dapat dipercaya. Proses dan struktur organisasi akan dilengkapi dengan sumber daya manusia yang

berkualitas. Pencapaian tujuan organisasi tetap dapat terjamin, meskipun kondisi struktural organisasi kurang sempurna. Sumber daya manusia yang mumpuni dapat menghadapi kondisi tersebut.

Salah satu daerah di Indonesia yang melakukan pengembangan inovasi dalam hal meningkatkan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat yaitu kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar bertanggungjawab untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan konteks sosial budayanya. Pemerintah Kota Makassar mempunyai kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan inovasi yang dilakukan pemerintah kota Makassar dapat terlihat pada program strategi walikota makassar yakni inovasi Lorong Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan ekonomi Kota Makassar sesuai dengan program yang terangkum dalam Makassar Recover dengan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pelaksanaan Program Lorong Wisata di Kota Makassar berdasarkan pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Lorong Garden dan Pemenuhan Lima Ribu Lorong Wisata. Namun peraturan tersebut belum dapat menampung kebutuhan dan perkembangan, sehingga ditetapkan Peraturan WaliKota khusus untuk Pembentukan Lorong Wisata. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata. Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa

Pelaksanaan Program Pembentukan Lorong Wisata, melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan BUMD.

Program Lorong Wisata merupakan program strategis dari Wali kota Makassar dengan melakukan penataan terhadap lorong-lorong yang ada di Kota Makassar. Selain itu, memberi peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan maksud terjadi perputaran rupiah. Konsep dari program Lorong Wisata ini sendiri yakni untuk dijadikan basis ekonomi kebangkitan dan pemberdayaan masyarakat lorong. Selain itu, lorong-lorong yang dikembangkan menjadi Lorong Wisata akan diberi nama-nama yang unik. Hal ini berdasarkan pada Dinas Pariwisata Kota Makassar menyampaikan bahwa akan memberi nama seperti Lorong taripang, lorong barongko, untuk dijadikan sebagai local influencer. Dari hal ini akan menarik rasa penasaran para wisatawan untuk mencari kue atau makanan khas Sulawesi Selatan di kota Makassar. Konsep ini tentu dapat menarik minat wisatawan baik lokal maupun internasional untuk mengunjungi Kota Makassar.

Tentunya dalam pelaksanaan program lorong wisata diperlukannya individu yang dapat menyukseskan program tersebut, dengan maksud bahwa lorong wisata di bentuk untuk memberdayakan masyarakat lorong serta dapat membantu dalam meningkatkan serta menstabilkan perekonomian masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan program lorong wisata juga di perlukan struktur yang baik yang dimaksudkan untuk agar

tujuan dan sasaran yang ingin telah di tetapkan dapat tercapai dengan baik.

Pelaksanaan program Lorong Wisata sampai saat ini masih belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal ini dilihat dari kurangnya pengelolaan terhadap lorong yang telah ditunjuk sebagai lorong wisata, selain itu tidak adanya tindak lanjut yang diberikan pemerintah setelah memberi bantuan berupa bahan untuk mempercantik dan menata lorong tersebut. Selain itu, kurangnya keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan Lorong wisata, sehingga hanya terdapat beberapa Lorong wisata tertata dengan baik. Berdasarkan temuan dilapangan bahwa terdapat lorong yang tidak di Kelola dan dikembangkan dengan baik yaitu Lorong Wisata Perak. Lorong tersebut memiliki potensi yang sangat besar, karena dapat mempromosikan produk yang di hasilkan yaitu kerajinan dari perak dan tembaga. Namun pada faktanya dilapangan masyarakat yang ada di lorong tersebut tidak aktif dalam mengembangkan lorong mereka. Fakta lain yang ditemukan dilapangan yaitu Lorong Wisata Budaya Kampung Paropo yang difokuskan pada kesenian yang berupa tarian tradisional, namun karena kurangnya pengelolaan dan keaktifan masyarakat dalam mengembangkan lorong, sehingga potensi yang ada dilorong tersebut tidak dimaksimalkan dengan baik. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dari Lorong Wisata.

Dalam memahami Inovasi agar dapat dimplementasi menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya yakni individu, struktur dan

budaya. Sebagaimana dimaksudkan bahwa bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur yang mengelilingi mereka dan bagaimana budaya dapat mempengaruhi struktur dan individu.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Implementasi Inovasi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana fokus dan pendekatan yang digunakan berbeda. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi inovasi yang memiliki 3 faktor Implementasi Inovasi. Berdasarkan pada uraian dan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik dan perlu melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor Individu dalam Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata Kota Makassar ?
2. Bagaimana Faktor Struktur dalam Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata Kota Makassar ?
3. Bagaimana Faktor Budaya dalam Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor Individu dalam Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor Struktur dalam Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor Budaya dalam Implementasi Inovasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkhusus kajian Implementasi Inovasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai Implementasi Inovasi.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, wawasan, serta rekomendasi pada pihak-pihak yang berkepentingan tak terkecuali pihak Dinas Pariwisata,

Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Pemerintah Kota Makassar agar dapat menerapkan faktor Implementasi Inovasi dalam menciptakan setiap pembaharuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Administrasi Publik

Administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat mencatat, pembukuan, surat menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya (Sawir, 2021). Istilah administrasi bagi masyarakat Indonesia, bukanlah hal baru. Sejak jaman kolonial Belanda, masyarakat Indonesia sudah mengenal istilah administrasi ketika berhubungan dengan pemerintah dalam berbagai kepentingan sosial Ekonomi (Banga, 2019). Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, *administratie* yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat (korepondensi), kearsipan, dan keagendaan (pekerjaan tata usaha kantor). Kata Administrasi juga berasal darii bahasa Yunani, *ad ministrare*. *Ad* artinya pada, sedangkan *ministrare* artinya melayani, maka kata *administrasi* berarti memberikan pelayanan. Berdasarkan pada pengertian tersebut dapat disimpulkan, administrasi ialah pelayanan kegiatan tata usaha kantor (pelayanan pengetikan/computer, pelayanan surat-menyurat) (Anggara & Sumantri, 2016).

Dwight Waldo (1996: 23) dalam (Maksudi, 2019) "*Public Administration*" adalah suatu *species* dalam lingkungan *genus administration*, dan *administration* ini termasuk dalam suatu keluarga yang disebut sebagai kegiatan yang kooperatif. The Liang Gie (1998) dalam (Hardiyansyah, 2019) mengemukakan bahwa rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup (1) dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerja sama; (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Tiga faktor inilah yang menjadi ciri khas dari administrasi.

Di dalam literature administrasi publik, tidak ditemui pengertian tunggal mengenai administrasi public, namun terdapat banyak variasi persepsi yang dikemukakan oleh para ahli administrasi publik. Dua jenis definisi administrasi Negara yakni *Public Administration* adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Serta *Public Administration* adalah suatu seni dan ilmu tentang *management* yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara. Sementara itu, Nigro dan Nigro dalam (Maksudi, 2019) mengemukakan pengertian administrai public adalah *Public administration refers to cooperative efforts in a public setting* (merupakan usaha kerja sama kelompok dalam suatu susunan atau lingkungan pemerintah. Yang mencakup ketiga cabang pemerintah berupa eksekutif, legislative dan yudikatif dan antar

hubungan dari ketiga badan tersebut. Memiliki peranan penting dalam perumusan kebijakan umum/Negara dan oleh karena itu merupakan bagian dari proses politik.

Menurut Dimock dan Dimock (1986) dalam (Maksudi, 2019)

“Public Administration is concerned with ‘what’ and ‘how’ of the government. The ‘what’ is the subject matter, the technical knowledge of a field, which enables the administrator to perform his tasks. The ‘how’ is the technique of management, the principles according to which co-operative programmes are carried through to success. Each is indispensable, together they form the synthesis called administration”

Artinya ialah administrasi public adalah mempersoalkan masalah-masalah ‘apa’ dan masalah ‘bagaimana’ dalam lingkungan pemerintah. Masalah-masalah ‘apa’ merupakan persoalan subjek pengetahuan mengenai suatu lapangan yang memungkinkan seorang administrator menjalankan tugas-tugasnya. masalah-masalah ‘bagaimana’ adalah berhubungan dengan teknik daripada manajemen, yakni prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk melaksanakan rencana-rencana kooperatif hingga berhasil. Masing-masing merupakan keharusan kedua-duanya bersama-sama membentuk sintesis yang disebut administrasi.

Menurut Nicholas Henry (1988: 26) dalam (Maksudi 2019: 225) mengemukakan:

“Public Administration is a broad-ranging and amorphous combination of theory and practice its purpose is to promote a superior understanding of government and its relationship with the society, it governs, as well as to encourage public policies more responsive to social needs and to institute managerial

practices attuned to effectiveness, efficiency and the deeper human requisites of the citizenry”.

Artinya bahwa administrasi publik merupakan kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaan. Administrasi Negara dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responsibilitas kebijakan Negara terhadap berbagai kebutuhan sosial, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien. Dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan suatu bentuk hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan resposibiitas melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat juga membentuk lembaga pemerintah yang efektif dan efisien.

Administrasi merupakan kunci dalam masyarakat modern. Charles A. Beard dalam (Maksudi 2019: 235) menyatakan bahwa masyarakat modern adalah masyarakat besar. Setiap usaha masyarakat modern akan mendapatkan ketenangan di bawah administrasi. Dengan kata lain bahwa administrasi merupakan kunci untuk kekuasaan di masyarakat besar. Paul H. Appleby dalam (Maksudi 2019: 235) mengemukakan bahwa administrasi adalah dasar dari pemerintah. Tidak ada pemerintah yang dapat berjalan dengan baik tanpa administrasi. Terdapat enam poin peran administrasi publik diberbagai aspeek yang tertera, yaitu:

- a. Dasar Pemerintahan: sebuah pemerintah bisa eksis tanpa legislatif atau pengadilan yang independen. Tapi pemerintah tidak bisa eksis tanpa administrasi.
- b. Alat untuk menyediakan Layanan: administrasi public terutama berkaitan dengan kinerja berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Felix A. Nigro dalam (Maksudi, 2019) menyatakan bahwa inti sebenarnya dari administrasi adalah layanan dasar yang dilakukan untuk masyarakat.
- c. Alat untuk Menerapkan Kebijakan: Pemerintah modern pergi jauh dalam merumuskan dan mengadopsi hukum kebijakan yang sehat dan peraturan. Ini tidak boleh dilupakan bahwa kebijakan tersebut, hukum, dan lain-lain tidak hanya dicetak dikertas, deklarasi kertas seperti niat, dijabarkan menjadi kenyataan dengan administrasi publik sehingga mengubah kata-kata kedalam tindakan dan bentuk menjadi zat.
- d. Sebuah Kekuatan Penyeimbangan di Masyarakat: Administrasi Publik adalah kekuatan utama untuk membawa stabilitas di masyarakat. Ia telah mengamati bahwa meskipun pemerintah sering berubah, tapi perubahan kekerasan jarang dialami oleh administrasi. Sebuah elemen kontinuitas antara yang lama dan pesanan baru disediakan oleh administrasi public.

- e. Sebuah Alat Perubahan Sosial dan pembangunan Ekonomi:
Peran Administrasi Publik sebagai agen perubahan sangat penting di Negara berkembang. Diharapkan Negara saat ini bekerja untuk mempercepat perubahan sosial-ekonomi, bukan menjadi agen pasif untuk mempertahankan status *quo*.
- f. Karakter Teknis:Pemerintah hari ini diharapkan dapat memberikan berbagai layanan kepada penduduknya. Peningkatan jumlah fungsi yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan layanan yang sangat khusus, professional dan teknis, administrasi public modern biasanya merupakan galaksi semua pekerjaan suatu Negara.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan (*Policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlancar kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.

Menurut Lasswell dan Kaplan dalam (Anggara, 2018a) kebijakan ialah sarana dalam mencapai tujuan. Kebijakan sebagai suatu program yang dirancang berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik. Adapun pendapat lain terkait kebijakan menurut Heinz Eulau dan

Kenneth dalam (Anggara, 2018a) kebijakan merupakan suatu ketentuan yang menuntut adanya perilaku yang rasional serta pengulangan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan. Chandler dan Plano dalam (Nugroho et al., 2021) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah penggunaan strategi sumber daya yang ada untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pemerintahan. Bahkan secara lebih rinci, Chandler dan Plano dalam (Nugroho et al., 2021) mempunyai pendapat bahwa: kebijakan publik adalah suatu bentuk investasi yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus untuk kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat, sehingga mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang sejalan dengan Easton (1969) dalam (Anggara, 2018b) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses manajemen, yang merupakan suatu tahapan dari serangkaian kerja pejabat public. Adapun menurut pandangan Ricard Hula dalam (Taufiqurakhman, 2014) menyatakan bahwa Kebijakan Publik adalah kemahiran pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial. Peters, B. Guy, (2015) dalam (Subianto, 2020) mengemukakan batasan makna kebijakan publik *merupakan the sum of government activities, wheter acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens*. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane dalam (Akib, 2010) bahwa implementasi

sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome.

Dalam persektif konseptual menurut pendapat Jones (1976) dalam (Anggara, 2018a) variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu kebijakan adalah sebagai berikut:

- a) Persepsi, dimaksudkan bahwa substansi kebijakan perlu diuraikan secara jelas termasuk latar belakang dan permasalahan yang mendorong perlunya mengangkat gagasan kebijakan tersebut.
- b) Agregasi, yakni indentifikasi ruang lingkup dan kuantitas berbagai pihak yang akan terkena dampak sebuah kebijakan.
- c) Organisasi/lembaga, dalam hal ini perlu dicermati tentang *record* para pelaku yang terlibat dalam pengusulan sebuah kebijakan.
- d) Agenda Setting, merupakan tata cara ataupun prosedur yang ditempuh dalam mencapai status agenda
- e) Formulasi, dalam hal ini perlu diperhatikan yakni lembaga yang mengusulkan sebuah kebijakan, sumber data/informasi termasuk ketersediaan anggaran, dasar hukum yang dijadikan acuan dan prosedur penetapan kebijakan.

a. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintahan yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik

merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara (Anggara, 2018a)

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak (Anggara, 2018a).

Fokus utama kebijakan public di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi serta menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi (Anggara, 2018a).

Fenomena kebijakan publik tidak hanya ada proses formulasi dilakukan atau cara substansi kebijakan publik dituangkan dan diimplementasikan, tetapi juga menyangkut dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda. Kebijakan public pun harus mampu mengagregasikan

berbagai kepentingan tersebut dalam suatu produk kebijakan yang bersifat prioritas, urgen serta mengarah pada upaya untuk menata kepentingan yang lebih luas (Anggara, 2018a).

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” (Anggara, 2018a) adapun yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”. Walaupun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, namun kata *policy* cenderung menggunakan istilah kebijakan. Oleh sebab itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Menurut James E. Aderson (1970) dalam (Sahya Anggara 2018) menyatakan bahwa *public policies are those developed by governmental bodies and officials* (kebijakan publik adalah kebijakn yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

Menurut David Easton dalam (Sahya Anggara 2018) *public policy is the authoritative allocation of values for the whole society* (kebijakan publik adalah pengalokasian; nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Sementara itu, Thomas Dye (1992: 2-4) dalam (Anggara, 2018a) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung

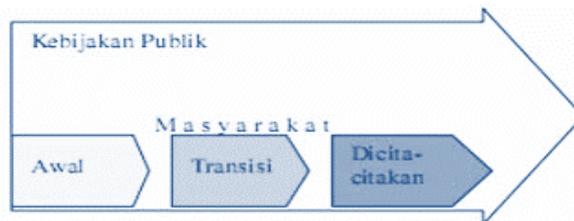
manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Bill Jenkins (Michael Hill, 1993: 34) dalam (Anggara, 2018a) mendefinisikan kebijakan publik sebagai

“...A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.”

Berdasarkan pada pandangan beberapa ahli, pada dasarnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

Oleh karena itu, kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan dalam (Anggara, 2018a) adalah sarana untuk mencapai tujuan, atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah di sepakati



Gambar 2.1 Kebijakan Publik

Sumber : Anggara (2018: 37)

Berdasarkan gambar diatas, kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. Menurut Riant Nugroho D. (2004: 52) dalam (Anggara, 2018a), kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan, serta mudah dikendalikan karena kebijakan public menyangkut politik.

Kebijakan Publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan menurut Nugroho (2004: 100-105) dalam (Anggara, 2018a), pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yakni:

- 1) Cara merumuskan kebijakan publick (formulasi kebijakan).
- 2) Cara kebijakan publik diimplementasikan.
- 3) Cara kebijakan publik dievaluasi.

b. Aspek-aspek Penting dalam Kebijakan Publik

Untuk memahami konteks dalam kebijakan publik, terdapat beragam perspektif yang berbeda, khususnya ketika melihat kebijakan publik secara kontekstual berdasarkan substansinya. Secara umum, membahas kebijakan publik sebagai konsep atau teori maka perspektif yang mewarnainya lebih bersifat politis, legal formal dan administratif.

1) Kebijakan sebagai Suatu Konsep

Beragam definisi mengenai konsep kebijakan (publik) sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Dye dalam Anggara (2018) bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Bullock et. al dalam (Anggara, 2018a) untuk bisa disebut sebagai kebijakan, suatu keputusan perlu diikuti langkah tindakan pelaksanaan yang bersasaran mencapai tujuan. Kebijakan sebagai suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini.

- a) Ketetapan, suatu kebijakan di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan yang memiliki pengaruh mengikat, baik ke dalam maupun keluar dari pembuat kebijakan.
- b) Maksud, adanya kebijakan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau mengatasi permasalahan tertentu.
- c) Keputusan, untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu
- d) Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari sebuah proses pengambilan keputusan yang harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan keputusan tersebut. Dapat dinyatakan bahwa setiap kebijakan merupakan keputusan, sedangkan keputusan belum tentu menjadi sebuah kebijakan (apabila tidak diimplementasikan).

2) Kebijakan Publik Merupakan Produk Pemerintah

Meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan mengenai kebijakan, pada intinya para ahli kebijakan memiliki kesepakatan yakni bahwa kebijakan publik merupakan produk dari pemerintah (termasuk lembaga-lembaga pemerintahan) yang ditujukan untuk memberikan arah dan pedoman untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam prosesnya, kebijakan publik hendaknya bersifat komprehensif, yakni memerhatikan berbagai hal yang mungkin dapat memengaruhi atau dipengaruhi.

3) Elemen-elemen dalam Sistem Kebijakan Publik

Melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan publik bukan merupakan hal yang sederhana. Karena sifatnya yang dapat berimplikasi luas, baik kepada pemerintah maupun masyarakat, proses kebijakan publik dalam formulasinya perlu memerhatikan lingkungan. Dunn (PKP2A I LAN, 2009: 13)

dalam (Anggara, 2018a) merumuskan tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik, yakni:

- a) Lingkungan kebijakan (*policy environments*), yaitu keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu “isu (masalah) kebijakan”, yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan kebijakan tersebut.
- b) Kebijakan publik (*public policies*), yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
- c) Pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), yaitu individu atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pemerintah.

c. Aspek-aspek yang berkaitan dengan Sistem Kebijakan Publik

Burdock (Suaib, 1988) dalam (Anggara, 2018a) menyatakan perlunya memerhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan. Menurut Burdock, terdapat tiga aspek kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Aspek kesejarahan. Perubahan kebijakan terjadi dalam konteks kebijakan yang sama yang pernah dibuat pada masa lalu.
- 2) Aspek lingkungan. Kebijakan publik tidak mungkin terlepas dari pengaruh lingkungan, yaitu ketika kebijakan tersebut dibangun dan dilaksanakan.
- 3) Aspek kelembagaan. Suatu kebijakan publik pasti akan selalu berhubungan dengan berbagai lembaga/institusi.

Secara empiris lingkungan memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses dan dinamika kebijakan publik. Kebijakan publik akan mengatur secara normatif proses interaksi yang harus dilakukan oleh publik dalam hubungannya dengan pihak lain.

3. Implementasi

Negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan (*goal*) yang harus direalisasikan, ia juga mempunyai berbagai permasalahan yang harus diatasi dikurangi atau dicegah. Permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal sebagai dampak negative dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Implementasi sering kali dipandang sekadar menjalankan keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan atau *policy makers*, seolah-olah dampaknya kecil. Namun pada kenyataannya, tahap implementasi sangatlah penting karena tanpa

implementasi yang tepat dan akurat, suatu kebijakan tidak akan ada artinya (Amalia et al., 2021). Budi Winarno dalam (Sonda et al., 2018) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi juga bersifat dinamis, sehingga pemecahannya memerlukan pendekatan holistic (*holistic approach*), yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai bagian dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur sendirian. Dengan demikian, karena masalah-masalah publik tidak dapat diatasi secara perorangan dan disamping itu dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Fullan (2007: 14) dalam (Cerna, 2013) banyak upaya perubahan gagal, hal ini karena tidak ada perbedaan yang dibuat antara teori perubahan (apa yang menyebabkan perubahan) dan teori perubahan (bagaimana mempengaruhi penyebab). Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan bahwa perubahan kebijakan sejalan dengan implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (1983: 20) dalam (Cerna, 2013) mendefinisikan implementasi sebagai suatu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang berkaitan dengan undang-undang tetapi juga dapat berbentuk perintah eksekutif penting atau keputusan pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan

publik ditetapkan dan diimplementasikan maka dampak positifnya akan dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Implementasi suatu program mencakup upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan sederhana, dalam implementasinya hanya melibatkan satu lembaga yang akan berfungsi sebagai pelaksana. Untuk kebijakan makro, kebijakan yang melibatkan banyak lembaga dalam upaya pelaksanaannya pada tingkat kabupaten, kecamatan atau desa (Mutiarin et al., 2017).

a. Konsep Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut Webster's Dictionary (1979: 914) dalam (Tachjan, 2006), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi.

Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu".

Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Berdasarkan kata implementasi diatas, Pressman dan Wildavsky (1978: xxi) dalam (Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa *implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* artinya bahwa membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan serta melengkapi. Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Jika pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasikebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Berdasarkan uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Implementasi kebijakan mengandung logika

yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit atau mikro.

b. Unsur-Unsur Implementasi

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah : “(1) unsur pelaksana (*implementasi*), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) *target groups*” (Abdullah, 1988 : 11; Smith,1977: 261) dalam (Tachjan, 2006)

1) Unsur Pelaksana

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik (Sharkansky, 1975; Ripley & Grace A. Franklin, 1986) dalam (Tachjan, 2006) pada setiap tingkat pemerintahan. Smith (Quade (1977: 261)) dalam (Tachjan, 2006) menyebutnya dengan istilah “*implementing organization*”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Hal ini seperti dikemukakan pula oleh Ripley & Grace A.Franklin (1986 : 33) dalam (Tachjan, 2006) bahwa:

“Bureaucracies are dominant in the implementation of program and policies and have varfing degress of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic unit play a large role, although the are not dominant”.

Maksudnya unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan.

Unit-unit administratif atau unit-unit birokratik berfungsi sebagai wadah, dalam hal ini berbagai kegiatan administrative yang bertalian dengan proses kebijakan publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan, unit pelaksana memiliki diskresi mengenai instrument yang akan digunakan.

Menurut Dimock and Dimock (1984: 117) dalam (Tachjan, 2006), ilmu administrasi terdiri dari pengetahuan tentang hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan publik, dalam phase pertama yang harus dilakukan oleh administrator dalam setiap unit administrative adalah menetapkan tujuan, dan sasaran dari rencananya. Penetapan tujuan, sasaran dan penyusunan rencana sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawab setiap pelaksana. Selanjutnya, rencana-rencana yang telah disusun dituangkan kedalam program-program operasional.

Dalam phase kedua, administrator melakukan pengorganisasian. Melalui tindakan ini, maka akan terbentuk suatu organisasi yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Setelah ditetapkan, dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu motivasi bagi setiap individu

maupun kelompok agar memiliki sikap dan komitmen dalam pelaksanaan program.

Pada phase terakhir, yang harus dilakukan oleh pelaksana program atau administrator yakni mengembangkan metode-metode serta prosedur yang dibutuhkan, dalam hal ini cara untuk tetap meninjau hasil sewaktu program dalam proses pelaksanaan. Hal ini berkaitan dengan pengawasan, maksud dan sasaran pengawasan ialah pelaksanaan program atau kegiatan operasional berlangsung dengan daya guna, hasil dan produktivitas tinggi yang memenuhi standar pekerjaan yang telah ditentukan serta terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tahapan akhir setelah pengimplementasian program dijalankan yakni penilaian terhadap pelaksanaan program. Penilaian merupakan langkah terakhir dalam proses administrasi dan sebagai salah satu fungsi organik manajemen untuk mengukur serta membandingkan hasil pekerjaan yang nyatadicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Dalam tataran praktis, Mulyadi (2015:12) dalam (Gita & Mulyadi, 2019) mengutarakan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar, yang terdiri atas beberapa tahapan, yakni: Tahapan pengesahan peraturan perundangan; 1. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; 2. Kesiadaan kelompok

sasaran untuk menjalankan keputusan; 3. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak; 4. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana; 5. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

2) Program

Hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Grindle (1980) dalam (Tachjan, 2006) bahwa :*"Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect"*. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilakukan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus di tempuh dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

G.R. Terry (1977: 253) (Tachjan, 2006) mengemukakan mengenai program bahwa

"A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can include objectives, policies, procedurs, methods, standards, and budget"

Artinya bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standart, serta budget.

Sehubungan dengan penyusunan program, dalam rangka untuk memudahkan dalam proses pengendalian serta pembuatan alokasi sumber dayanya dengan baik, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai suatu format untuk presentasi informasi anggaran. Berdasarkan permasalahan pokok yang berkembang serta prioritas pemecahannya pada setiap unit administratif, program dapat dikelompokkan secara berjenjang. Setelah masalah diidentifikasi dan dilakukan pemilihan alternatif yang paling rasional untuk diajukan sebagai kebijakan puncaknya, kemudian dijabarkan ke dalam rencana-rencana, maka tahap implementasi itu akan mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut:

- a) Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
- b) Melaksanakan (mengaplikasikan) program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana

dan sumber-sumber lainnya, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat.

- c) Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kegiatan.

3) Target Group

Target grup (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Dalam hal ini diharapkan dapat diterima dan menyesuaikan terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Selanjutnya, sampai seberapa jauh kelompok dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi yaitu komunikasi. Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga apabila proses komunikasi tidak berjalan dengan baik maka mempengaruhi capaian efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, kebijakan dapat disebarluaskan melalui komunikasi yang terjalin dengan

baik sehingga dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

c. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Dalam perspektif lain, implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika individu maupun kelompok tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan maksud dari kebijakan. Ada sepuluh faktor yang mengakibatkan implementasi kebijakan dapat dikatakan efektif atau tidak (Agustino, 2020).

- 1) Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan Pemerintah, faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimat. Apabila public menghormati pemerintah yang berkuasa oleh karena legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui pelbagai bentuk kebijakan.
- 2) Kesadaran untuk menerima kebijakan, individu maupun kelompok yang mau menerima dan melaksanakan kebijakan public sebagai sesuatu yang logis, rasional, serta memang perlu.
- 3) Ada atau tidaknya sanksi hukum, faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif ialah

sanksi hukum. Setiap individu akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan karena tidak ingin mendapat sanksi hukum seperti denda, kurungan, dan sanksi lainnya.

- 4) Kepentingan pribadi atau kelompok, subjek kebijakan sering memperoleh keuntungan dari suatu pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.
- 5) Bertentangan dengan sistem nilai yang ada, implementasi kebijakan pun dapat berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada disuatu daerah.
- 6) Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, kepatuhan atau ketidakpatuhan individu atau kelompok pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung tidak bergabungnya subjek kebijakan dalam suatu organisasi tertentu atau tidak.
- 7) Wujud Kepatuhan selektif, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 8) Waktu, efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor waktu.
- 9) Sosialisasi, hal yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakan

atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan pelbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasikan.

10) Koordinasi Antar-Lembaga atau Antar Organisasi, implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan *stakeholder*. Oleh karena itu, koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan. Realita ini sangat diperlukan karena koordinasi antarlembaga atau antarorganisasi yang seharusnya menjalankan dan atau mengawasi justru tidak melaksanakan koordinasi tersebut.

4. Inovasi

Ketertarikan yang mendasari inovasi berasal dari cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu, mungkin untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, tetapi ruang lingkup atau skala perubahan dapat menyebabkan orang yang berbeda memberi label inovatif sementara yang lain tidak. Laurence O'Toole dalam (Steelman 2010: 5) mendefinisikan inovasi kebijakan sebagai pola kegiatan untuk mencapai tujuan baru atau meningkatkan pencapaian tujuan yang sudah mapan. Menurut Everret M. Rogers dalam (Steelman 2010: 5) inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh

individu yang mengadopsinya. Kanter (1983) dalam (Akbar & Buwana, 2018) mendefinisikan:

Inovasi sebagai generasi, penerimaan, dan implementasi ide-ide, proses, produk, atau layanan baru. Konsep inti dari inovasi adalah bahwa hal itu terjadi ketika elemen baru atau kombinasi baru elemen lama diperkenalkan.

Kebijakan dan program inovatif adalah hal baru bagi entitas yang mengadopsinya. Inovasi secara bertahap dapat mempengaruhi program atau kebijakan yang ada, tetapi juga dapat menjadi produk dari sesuatu yang sama sekali baru. Regulasi mandiri, koregulasi, regulasi awal dan regulasi sukarela adalah empat kategori besar pengaturan inovatif.

Inovasi adalah suatu proses yang melibatkan tindakan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru dalam kaitannya dengan masukan, proses, dan keluaran, serta berpotensi meningkatkan taraf hidup manusia. Pola pikiran atau gagasan manusia digambarkan sebagai inovasi yang berhubungan dengan masukan ketika membantu menghasilkan penemuan-penemuan baru (Afdal et al., 2022).

Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Dengan asumsi ini maka inovasi tidak akan muncul dalam lingkungan yang statis dengan karakter sosial individu atau kelompok yang status quo. Persoalannya bahwa manusia pada dasarnya adalah individu yang tidak menyukai perubahan sehingga berkecenderungan untuk selalu menolak

perubahan. Sehingga dalam lingkungan apapun, kecenderungan pertama kali yang muncul ketika sebuah inovasi hadir adalah kecenderungan penolakan.

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Inovasi

Inovasi sendiri sebenarnya juga merupakan istilah yang relatif baru apabila diukur dari perjalanan sejarah peradaban manusia. Istilah ini berasal dari bahasa latin *innovare* yang berarti berubah sesuatu yang menjadi baru. Istilah inovasi (*innovation* dan *innovate*) sendiri baru mulai dikenal dalam kosakata bahasa Inggris pada abad ke-16. Hanya saja pada masa itu, istilah inovasi lebih banyak diasosiasikan secara negatif sebagai *troublemaker* serta lebih identik dengan nuansa revolusi atau perubahan radikal yang membawa dampak yang sangat luar biasa, terutama terhadap kemapanan sosial politik serta dianggap mengancam struktur kekuasaan. Sehingga rejim kekuasaan dan politik, serta otoritas keagamaan pada masa itu cenderung menolak segala hal yang berbau inovasi. Adapun istilah *innovative* sendiri mulai luas dipergunakan banyak orang sejak abad ke-17, atau sekitar 100 tahun kemudian.

Barulah kemudian setelah sekitar 300 tahun kemudian, pengertian inovasi perlahan mengalami pergeseran makna menjadi lebih positif. Inovasi dipahami sebagai “*creating of something new*” atau penciptaan sesuatu yang baru. Istilah inovasi menemukan

pengertian modernnya untuk pertama kali dalam Oxford English Dictionary edisi tahun 1939 yaitu “the act of introducing a new product into market”. Dalam hal ini inovasi dipahami sebagai proses penciptaan produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang incremental. Dalam literatur modern, inovasi sendiri memiliki pengertian yang sangat beragam serta banyak perspektif yang mencoba memaknainya. Salah satu pengertian menyebutkan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. Pengertian ini menekankan pemahaman inovasi sebagai sebuah kegiatan (proses) penemuan (invention).

Damanpour menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Sejalan dengan itu menurut Rogers dalam (Rogers, 1983) , salah satu penulis buku inovasi terkemuka, menjelaskan bahwa *an innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by individual or other unit of adopter*. Jadi inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Pengertian dari Damanpour maupun Rogers ini menunjukkan bahwa inovasi dapat merupakan

sesuatu yang berwujud (tangible) maupun sesuatu yang tidak berwujud (intangible). Sehingga dimensi dari inovasi sangatlah luas. Memaknai inovasi sebagai sesuai yang hanya identik dengan teknologi saja akan jadi menyempitkan konteks inovasi yang sebenarnya.

Adapun pemikir lain yang mencoba memberikan limitasi dalam memahami inovasi adalah Schumpeter dalam (Halvorsen, 2005) yang membatasi pengertian inovasi yaitu "*restricted themselves to novel products and processes finding a commercial application in the private sector*". Dalam pembatasan ini Schumpeter menekankan 2 (dua) hal penting dari inovasi, yaitu:

- 1) Sifat kebaruan (novelty) dari sebuah produk. Dengan kata lain inovasi hanya berhubungan dengan produk-produk yang bersifat baru.
- 2) Bahwa inovasi berhubungan dengan proses pencarian aplikasi komersial di sektor bisnis.

Albury dalam (Albury, 2003) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya. Selanjutnya Albury secara rinci menjelaskan bahwa

“successful innovation is the creation and implementation of new processes, products, services, and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness, or quality”.

Ini menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas.

Dengan demikian, inovasi dapat hadir dalam wujud pengetahuan, cara, objek, teknologi dan atau penemuan baru. Sifat yang mendasar dari inovasi adalah sifat kebaruan (novelty). Oleh karena itu, sebuah produk (barang atau jasa) dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila memang dipandang baru oleh pasarnya (masyarakat). Namun demikian sifat kebaruan ini biasanya hanya berlaku dalam konteks limitasi geografis. Artinya sesuatu yang baru di satu tempat, belum tentu baru di tempat yang lain.

b. Faktor Penghambat Inovasi

Inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak dari kasus inovasi diantaranya justru terkendala oleh berbagai faktor. Biasanya budaya menjadi faktor penghambat terbesar dalam mempenetrasikan sebuah inovasi.



Gambar 2.2 Siklus Hambatan Inovasi

Sumber: Albury (2003: 31) dalam (Suwarno, 2008)

Hambatan inovasi diidentifikasi ada delapan jenis. Salah satunya yang dimaksud dengan budaya risk aversion adalah budaya yang tidak menyukai resiko. Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki segala resiko, termasuk resiko kegagalan. Sektor publik, khususnya pegawai cenderung enggan berhubungan dengan resiko, dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara prosedural-administratif dengan resiko minimal. Selain itu, secara kelembagaan pun, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani resiko yang muncul akibat dari pekerjaannya. Hambatan lain adalah ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi follower. Selain itu, hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak fleksibel. Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif

masih sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang layak atas prestasi pegawai atau unit yang berinovasi.

Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan menghadirkan perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan pekerjaannya. Namun di sisi lain muncul hambatan dari segi budaya dan penataan organisasi. Budaya organisasi ternyata belum siap untuk menerima sistem yang sebenarnya berfungsi memangkas pemborosan atau inefisiensi kerja.

c. Inovasi dan Kebijakan Publik

Sektor publik adalah sektor yang bercirikan non komersial, berorientasi pada kepentingan umum, berlandaskan pada legitimasi kekuasaan, dan adanya interaksi akuntabilitas dan transparansi antara warga negara (rakyat) sebagai pemberi mandat dengan negara atau pemerintah sebagai eksekutor kebijakan publik. Oleh karena sektor publik digerakkan oleh adanya kebijakan publik, maka inovasi di sektor publik mau tidak mau akan selalu berhubungan dengan formulasi kebijakan publik. Inovasi di sektor publik akan sangat sulit hadir apabila tidak menyertakan atau melibatkan prosesi kebijakan publik di dalamnya.

Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah yang saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai

sebuah produk yang baru dan sifatnya yang menggantikan cara yang lama. Demikian pula sifat dari kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan yang lama. Ini artinya bahwa setiap kebijakan, secara isi (konten) pada prinsipnya harus memuat inovasi baru. Kebijakan yang tidak memuat sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama hanya akan menjadi kebijakan yang tidak fungsional. Penerapan inovasi kebijakan berdasarkan proses lebih menekankan pada peningkatan kualitas proses kerja secara internal dan eksternal, dari berbagai stakeholder yang dilakukan secara efisien dan efektif. Mekanisme kerja organisasi publik yang cenderung lambat, berbelitbelit dan rumit dirubah ke arah mekanisme kerja yang cepat, tepat dan produktif (Anggara et al., 2020).

Dalam pembauran frasa inovasi dengan kebijakan, dikenal tiga jenis interaksi inovasi dengan kebijakan, yaitu :

- 1) *Policy innovation: new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan) Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru. Secara khusus inovasi kebijakan menurut Walker (Tyran & Sausgruber, 2003: 4) dalam (Triton, 2007),

“policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, no matter how old the program may be or how many other states may have adopted it”.

Jadi yang dimaksud dengan inovasi kebijakan menurut Walker adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang mengadopsinya, tanpa melihat seberapa usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang telah mengadopsi sebelumnya.

2) *Innovations in the policy-making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan). Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Sebagai contoh adalah, proses perumusan kebijakan selama ini belum memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau stakeholder terkait. Padahal UU SPPN mensyaratkan adanya partisipasi warga. Oleh karena itu inovasi yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan mekanisme partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan.

3) *Policy to foster innovation and its diffusion*

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor. Berkaitan dengan itu Berry & Berry menjelaskan bahwa penyebaran inovasi kebijakan terjadi dengan merujuk pada dua

determinan penting, yaitu *internal determinant*, dan *regional diffusion*. Yang dimaksud dengan *internal determinant* atau penentu internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara menentukan keinovativan sebuah negara. Sedangkan *regional diffusion* atau difusi regional adalah kemungkinan sebuah negara mengadopsi kebijakan tertentu lebih tinggi jika negara-negara tetangganya telah mengadopsi kebijakan tersebut.

Inovasi kebijakan dapat terjadi karena salah satu dari dua faktor tersebut, atau mungkin juga terjadi karena dua faktor tersebut. Namun demikian pada banyak kasus, inovasi kebijakan didorong oleh kedua faktor internal dan eksternal tersebut.

Adapun tipologi inovasi di sektor publik menurut Halvorsen⁸ adalah sebagai berikut:

- 1) a new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki), misalnya kesehatan di rumah.
- 2) process innovation (inovasi proses), misalnya perubahan dalam proses penyediaan pelayanan atau produk.
- 3) administrative innovation (inovasi administratif), misalnya penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan.
- 4) system innovation (inovasi sistem), adalah sistem baru atau perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan

mendirikan organisasi baru atau bentuk baru kerjasama dan interaksi.

- 5) conceptual innovation (inovasi konseptual), adalah perubahan dalam outlook, seperti misalnya manajemen air terpadu atau mobility leasing.
- 6) radical change of rationality (perubahan radikal), yang dimaksud adalah pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi pemerintah

Dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publik adalah terdiri dari :

- a) inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan (desain) produk-produk jasa dan proses-proses produksi termasuk pembangunan, penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan.
- b) Inovasi deliver termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus.
- c) Inovasi administratif dan organisasional termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi supplier.
- d) Inovasi konseptual dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan, strategi dan rationale baru.

- e) Inovasi interaksi sistem—cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi lain.

5. Implementasi Inovasi

Dalam pandangan ini, implementasi inovasi yang efektif adalah fungsi dari beberapa aktivitas yang saling terkait. Dari perspektif top-down, penerapan kebijakan inovatif secara efektif adalah fungsi menyelaraskan struktur formal dan insentif. Implementasi adalah proses administrasi yang rasional dengan struktur kelembagaan formal, informasi yang berfokus dan alokasi sumber daya yang menjadi pusat tujuan kebijakan.

Implementasi keputusan kebijakan mendasar, menurut Abdul Wahab, biasanya berbentuk undang-undang tetapi bisa juga berbentuk perintah, keputusan eksekutif yang signifikan, dan keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah (Wulansari, 2023). Proses ini melibatkan identifikasi masalah, menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dipenuhi, dan menentukan bagaimana cara mencapainya (Wulansari, 2023). Jika dilihat secara luas, implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum di mana banyak individu, organisasi, proses, dan pendekatan berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan menurut Winarno dalam (Kholif et al., 2014). Implementasi suatu kebijakan pada prinsipnya adalah melihat sejauh mana suatu

kebijakan dapat mencapai tujuannya (Blom-Hansen, 2005) dalam (Bando et al., 2023).

Teori implementasi top-down dapat dikontraskan dengan teori implementasi bottom-up yang mendesak pertimbangan dari perspektif individu dalam proses implementasi. Hubungan dalam lingkungan kerja berbentuk norma dan muncul sebagai hasil dari pengalaman sebelumnya. Budaya organisasi, sosial, norma-norma dan keinginan untuk menjaga keharmonisan ditempat kerja membentuk predisposisi aktor individu terhadap perubahan.

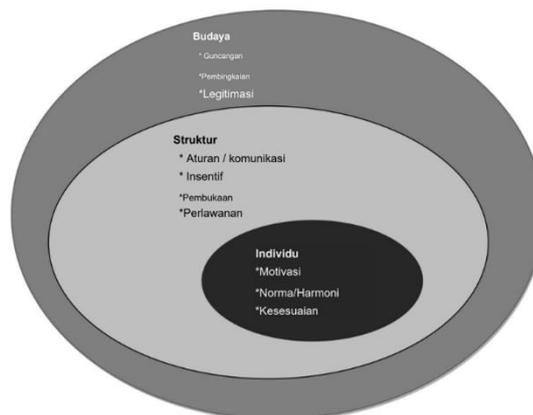
Perspektif individu dalam proses inovasi sebagian besar diabaikan. Perspektif ini penting untuk dipertimbangkan karena mewarnai cara individu berinteraksi dan membentuk motivasi untuk partisipasi. Kekuatan untuk mengimplementasikan suatu inovasi pada akhirnya terletak pada mereka yang paling dekat dipengaruhi oleh inovasi tersebut. Banyak pembuat kebijakan tidak mempertimbangkan aspek motivasi atau perilaku yang dapat memberikan insentif individu untuk inovasi. Aktor individu akan cenderung ke arah perubahan tergantung pada budaya organisasi, norma sosial dan keinginan untuk menjaga keharmonisan ditempat kerja.

Perspektif kelembagaan, kemungkinan penerapan inovasi meningkat ketika tingkat pengambilan keputusan yang berbeda saling mendukung dan ketiga proses diselaraskan. Bagi institusionalis pilihan nasional, ini berarti berfokus pada individu dan persepsi. Dorongan

untuk inovasi terletak pada individu yang tidak puas yang bebas untuk merancang solusi alternative yang memungkinkan.

Bagi para institusionalis sosiologi, faktor-faktor penentu yang mempengaruhi inovasi adalah kognitif yang membentuk jenis informasi apa yang dianggap relevan bagi individu, dan batasan budaya yang mengarahkan individu untuk mempertanyakan apakah perubahan itu terjadi.

Toddi A Steelman dalam (Steelman, 2010) menjabarkan tiga faktor yang dapat mempengaruhi implementasi inovasi:



Gambar 2.5 Hubungan Faktor Individu, Struktural, dan Budaya Yang Mempengaruhi Implementasi Inovasi

Sumber: Toddi A Steelman dalam (Steelman, 2010)

a) Individu

Individu merupakan elemen penting dalam mengimplementasikan suatu inovasi atau program dimana didalamnya meliputi:

1. Motivasi, menjadi pendorong bagi individu dalam melaksanakan inovasi, dimana terletak pada individu yang tidak puas, bebas untuk merancang solusi-solusi alternative
2. Norma dan Harmoni, mempertimbangkan keinginan individu untuk mempertahankan hubungan kerja yang baik.
3. Kesesuaian, menyiratkan nilai-nilai dominan dalam lembaga federal atau Negara bagian dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah akan memengaruhi dukungan individu untuk inovasi tertentu. Individu tampil dalam budaya suatu lembaga atau organisasi dan bahwa budaya yang dominan meresapi ekspektasi dalam struktur. Jika nilai individu tidak sesuai dengan nilai agensi yang dominan, maka hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi individu untuk mendukung praktik inovatif.

b) Struktur

Dalam mengimplementasikan Inovasi diperlukan struktur yang tertata dengan baik, adapun indikator dalam suatu struktur yakni:

- 1) Aturan dan Komunikasi. Administratif peraturan, komunikasi, dan pertukaran informasi mendukung kepatuhan. Dalam struktur diperlukan komunikasi karena memberi dukungan administrative yang jelas untuk proaktif inovatif.

- 2) Insentif, organisasi memberikan insentif dari sumber daya untuk mengubah biaya manfaat kalkulus untuk mendukung inovasi. Pilihan rasional yang menyiratkan bahwa biaya-manfaat individu untuk berpartisipasi dalam praktik inovatif dapat dibentuk sesuai dengan insentif yang tepat. Jika struktur memberikan insentif yang tepat, maka inovasi memiliki peluang yang lebih baik untuk diimplementasikan dari waktu ke waktu.
 - 3) Keterbukaan, struktur politik memungkinkan kelompok yang terpinggirkan kesempatan untuk mendorong perubahan, hal ini menunjukkan bahwa struktur politik harus terbuka untuk berubah dan bahwa kesempatan untuk membuka struktur politik tidak sama untuk semua individu atau kelompok.
 - 4) Resistensi, Inersia dalam institusi yang ada menciptakan resistensi terhadap yang baru praktik. Upaya mungkin terhalang oleh dinamika kekuatan yang lebih besar dan kepentingan pribadi. Termasuk kekuatan inersia yang menghambat perubahan. Inovasi tidak dibawa ke dunia yang bebas dari struktur dan dinamika kekuasaan yang ada.
- c) Budaya

Dalam mengimplementasikan suatu inovasi, Steelman, 2010 menjelaskan bahwa di perlukannya suatu budaya dalam pencapaian implementasi inovasi :

- 1) Kejutan/Guncangan, mengacu pada peristiwa katalitik yang memberikan kesempatan untuk membayangkan kembali kemungkinan perubahan.
- 2) Pengelompokan, Proses pengelompokan dapat mengkondisikan persepsi orang bahwa mereka dirugikan dan bahwa dengan bertindak secara kolektif mereka dapat memperbaiki situasi. Alternatif untuk mendobrak pandangan dunia budaya tradisional.
- 3) Legitimasi, praktik inovatif dapat diadopsi dan dipertahankan karena memvalidasi organisasi atau lembaga dengan cara yang berarti dalam budaya yang lebih luas di mana organisasi beroperasi.

6. Lorong Wisata

Lorong wisata merupakan salah satu program strategis Wali Kota Makassar. Lorong Wisata merupakan salah satu upaya peningkatan ekonomi Kota Makassar. Dengan mengangkat konsep *instagramable* dengan maksud untuk menarik perhatian wisatawan. Menata dan mempercantik lorong dengan seni mural yang dikombinasikan warna-warna yang menarik. Serta mengubah lorong-lorong kota Makassar yang identik dengan keadaan kotor dan sempit diubah menjadi bersih dan tertata rapi.

Pelaksanaan program Lorong Wisata ini awalnya berdasarkan pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Lorong Garden dan Pemenuhan Lima Ribu Lorong Wisata. Namun, belum dapat menampung kebutuhan dan perkembangan yang ada. Sehingga dibuat peraturan khusus untuk lorong wisata yang menjadi landasan dilaksanakannya lorong wisata yakni Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata. Dengan tujuan pada Pasal 3 dijelaskan bahwa untuk melakukan pemetaan dan klasterisasi potensi lorong berbasis teknologi informasi, berdasarkan potensi lorong dalam penentuan Lorong Wisata yang terkait dengan potensi sumber daya manusia, potensi fisik lingkungan dan potensi pengembangan ekonomi; mengembangkan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis *green garden*, kuliner dan kerajinan; dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengembangkan ekonomi lorong berdasarkan potensi yang dimiliki. Adapun ruang lingkup dalam pelaksanaan Lorong Wisata berdasarkan Peraturan Walikota Makassar yakni potensi lorong penetapan lorong wisata dan dewan lorong, pelaksanaan program, tugas dan peran, gugus tugas dan tim teknis, pembinaan dan pengawasan dan sumber pembiayaan. Dalam pelaksanaan lorong Wisata juga hendak mencapai potensi-potensi yang ada di dalam lorong wisata, adapun potensi yang hendak di capai yakni potensi

pengembangan usah dan Kawasan kuliner; potensi pembinaan dan pengembangan budaya dan seni; potensi peningkatan budidaya tanaman, potensi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, potensi peningkatan Industri Kecil; potensi pembinaan keumatan/religi dan penataan sarana; potensi pembinaan Pendidikan; potensi pembinaan tanggap bencana; potensi peningkatan teknologi dan informasi; potensi peningkatan Bank Sampah; Potensi pengembangan dan peningkatan infrastruktur; potensi peningkatan pelayanan Kesehatan; potensi pemetaan asset; potensi pembinaan kepemudaan; potensi pembinaan dan pelayanan kependudukan; potensi peningkatan pelayanan sosial masyarakat. Dalam penetapan lorong wisata terlebih dahulu Lurah, LPM, RT, RW melaksanakan rapat untuk pengusulan Lorong yang berpotensi di wilayahnya untuk menjadi Lorong Wisata, setelah laporan berdasarkan hasil rapat dituangkan dalam bentuk berita acara yang kemudian diusulkan ke Camat untuk ditetapkan lokasi dan potensi Lorong Wisata. Selanjutnya dilakukan verifikasi teknis yang berkoordinir oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar bersama Perangkat Daerah terkait serta dapat melibatkan Tim Ahli Wali Kota sebelum ditetapkan menjadi Lorong Wisata.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai bahan perbandingan dari kajian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini. Hasil penelitian yang dijadikan sebagai perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian tentang *Implementasi Inovasi*.

Untuk memudahkan identifikasi dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan tabel komparasi penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Komperasi Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun/Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Tesis Sekarang	Relevansi	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
1	Hari Nugraha/ 2019/ Implementasi Inovasi Sektor Publik Studi Pada Inovasi E-Office Satu Pintu Di Puslatbang PKASN LAN (Nugraha, 2019)	Inovasi dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu penciptaan, penerimaan dan implementasi ide. Dalam tahap penciptaan kegiatan yang dilakukan yaitu membentuk tim dan mengidentifikasi masalah, pada tahap penerimaan dilakukan kegiatan perumusan tujuan inovasi dan pengkajian terhadap inovasi, pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan yaitu merancang aplikasi dan mekanisme kerja menyusun modul dan manual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi inovasi program Lorong Wisata menunjukkan bahwa dalam motivasi senantiasa di berikan dalam pelaksanaan lorong wisata kepada masyarakat. Untuk mendorong masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan lorong wisata.	Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu ingin melihat inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan teori dari masing-masing penelitian.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada teori dan focus yang dilakukan peneliti.
2	Muhammad Gunawan/ 2022/ Implementasi Program Pengembangan Wisata Superpremium Di Badan Pelaksanaan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores	Keberhasilan dari implementasi program pengembangan terletak pada tiga unsur pembentukan super premium yaitu unsur pariwisata , tata ruang dan kemewahan.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program lorong wisata belum sepenuhnya terpenuhi keselarasan atau kesesuaian pada masyarakat dalam hal pelaksanaan dari program lorong wisata.	Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu ingin melihat inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan teori dari masing-masing penelitian.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada penelitian terdahulu melihat pengembangan Wisata, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu implementasi inovasi dari lorong wisata.

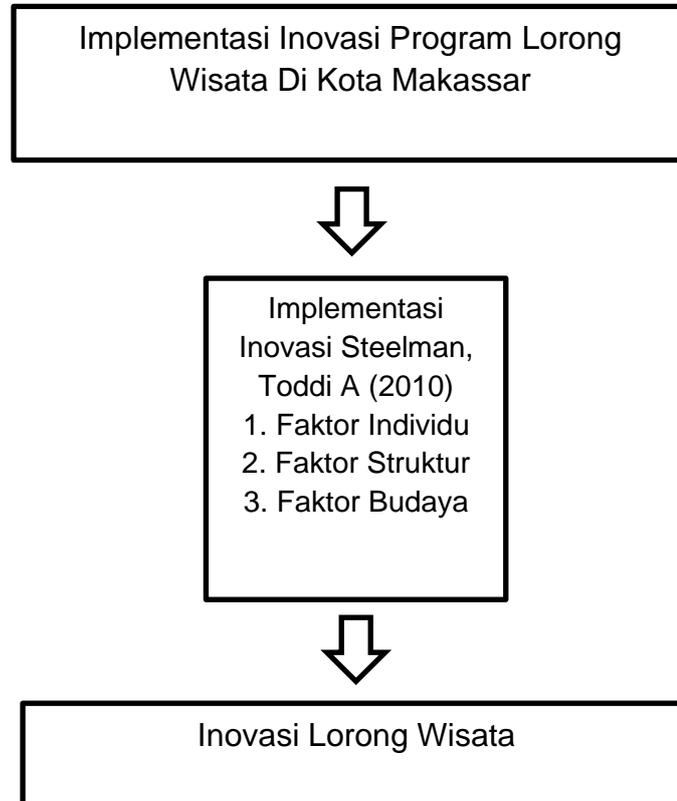
No	Nama/ Tahun/Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Tesis Sekarang	Relevansi	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
3	Irfan Setiawan/ 2017/ Implementasi Inovasi Daerah Di Kota Balikpapan (Setiawan, 2017)	Hasil temuan menyatakan bahwa inovasi yang dikembangkan melalui penerapan konsep smartcity memang masih belum lama terlaksana dan terbilang baru, namun penerapannya menandakan adanya niat serius dari pemerintah Kota.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan inovasi program lorong wisata senantiasa terjalin komunikasi baik antara SKPD, pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan serta masyarakat.	Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu ingin melihat inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan teori dari masing-masing penelitian.	Penelitian ini menggunakan Konsep Smart City. Adapun teori yang peneliti gunakan yakni Implementasi inovasi yang dikemukakan oleh Steelman, Toddi A (2010)
4	Lydia Wijayanti/ 2012/ Implementasi Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta: Relokasi PKL di Taman Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo (Wijayanti, 2012)	Hasil temuan dalam penelitian ini yakni Inovasi Kebijakan yang dilakukan Pemkot Surakarta merupakan inovasi yang dibangun melalui pendekatan berbudaya Kota Surakarta yang berkelanjutan. keberhasilan dari inovasi kebijakan ini berdasarkannpada mekanisme tata kelola Pemkot Surakarta	Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan lorong wisata tidak terdapat penolakan dari masyarakat maupun kelompok tertentu.	Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu ingin melihat inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan teori dari masing-masing penelitian.	Penelitian ini ingin melihat Implementasi Inovasi dari kebijakan pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti yakni menganalisis implementasi inovasi Lorong Wisata di Kota Makassar menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Toddi A. Steelman (2010)
5	Muh Fatlullah Baqi Bando/2023/ Implementasi Inovasi Pelayanan Kepegawaian Di	Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan faktor-faktor temuan yang dilakukan peneliti sudah cukup berhasil namun masih terdapat	Hasil penelitian menjelaskan bahwa inovasi program lorong wisata menjadi program andalan di	Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu ingin melihat inovasi yang diimplementasikan	Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat implementasi inovasi pelayanan kepegawaian di kantor Reginonal IX

No	Nama/ Tahun/Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Tesis Sekarang	Relevansi	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
	Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura (Bando, 2023)	kekurangan dalam pelaksanaan yakni belum selaras pada layanan kenaikan pangkat.	Kota Makassar.	sesuai dengan teori yang digunakan masing-masing penelitian.	BKN Jayapura. sedangkan pada penelitian yang peneliti gunakan yakni ingin melihat implementasi inovasi Lorong Wisata di Kota Makassar menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Toddi A. Steelman (2010). Meskipun teori yang digunakan pada peneliti sebelumnya dan penelitian ini namun terdapat perbedaan pada focus dari masing-masing penelitian.

C. Kerangka Pikir

Program Lorong Wisata menjadi program strategis Wali Kota Makassar dalam upaya meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Makassar . Dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di lorong.

Untuk melihat pengimplementasian program Inovasi Lorong Wisata Kota Makassar maka perlu adanya tolak ukur dalam melihat keberhasilan Implementasi Inovasi program tersebut. Steelman dalam (Steelman, 2010) melalui pendekatan faktor Implementasi Inovasi dianggap relevan dalam melihat keberhasilan pelaksanaan inovasi dalam hal ini Implementasi Inovasi Lorong Wisata Kota Makassar



Gambar 2.8 Kerangka Pikir